

TINJAUAN YURIDIS PENENTUAN FAKTOR PENYESUAI SEWA BARANG MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

MONGGA SURYA ANDOKO

Ilmu Hukum

Pembimbing:

Suhariwanto

Wafia Silvi Dhesinta Rini

Abstrak

Fokus dalam penulisan ini adalah mengenai pemanfaatan yang salah satunya sewa BMD khususnya mengenai penetapan tarif sewa BMD. Salah satu wujud pemanfaatan BMD adalah melalui sewa menyewa barang milik daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasilnya adalah Pemerintah Daerah menggunakan landasan yuridis dalam penentuan faktor penentu sewa dengan merujuk pada regulasi pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan sektor BMD yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang kemudian diubah Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang kemudian diubah Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara seharusnya tidak digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai BMD. Hal itu dikarenakan peraturan menteri keuangan adalah untuk mengatur BMN, sedangkan segala hal yang berkaitan BMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak cukup memiliki materi muatan yang mengatur secara teknis tentang Faktor Penentu harga sewa BMD Tidak ada ketentuan faktor penentu sewa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sehingga perlu adanya pembaharuan terhadap regulasi pemerintah pusat, khususnya pada Peraturan Pemerintah dengan memisahkan Peraturan Pemerintah antara BMN dan BMD, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan menambah ketentuan tentang faktor penentu harga sewa BMD secara lebih spesifik sehingga pembentukan Peraturan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, tidak lagi pada Peraturan Menteri Keuangan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah, Otonomi Daerah

JURIDICAL REVIEW OF THE DETERMINATION OF FACTORS FOR ADJUSTING THE LEASE OF LOCAL PROPERTY BY LOCAL GOVERNMENTS

MONGGA SURYA ANDOKO

Legal Studies

Contributor:

Suhariwanto

Waffia Silvi Dhesinta Rini

Abstract

This writing focuses on the utilization, one of which is BMD rentals, especially regarding determining BMD rental rates. One form of BMD utilization is through renting locally owned goods. Metode research used is normative juridical legal research methods. The result is that local governments use a juridical basis in determining the determinants of rent by referring to central government regulations that are not following the BMD sector, namely the Minister of Finance Regulation Number 78 / PMK.06 / 2014 concerning Procedures for the Implementation of Utilization of State Property which was later amended by Minister of Finance Regulation 115 / PMK.06 / 2020 concerning Utilization of State Property Regulation of the Minister of Finance Number 78 / PMK.06 / 2014 concerning Procedures for Implementing Utilization State-owned goods, which were later amended by Minister of Finance Regulation 115/PMK.06/2020 concerning the Utilization of State Property, should not be used by local governments as a basis for the formation of Regional Regulations on BMD. This is because the regulation of the Minister of Finance is to regulate BMN. In contrast, all matters related to BMD are regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs. However, the Minister of Home Affairs Regulation does not have enough material content that technically regulates the Determinants of BMD rental prices. There is no provision for rent determinants in the Minister of Home Affairs Regulation. So there is a need to update the central government regulations, especially in Government Regulations by separating Government Regulations between BMN and BMD, and also the Minister of Home Affairs Regulations by adding provisions on the determining factors of BMD rental prices more precisely so that the establishment of Regional Regulations refers to the Regulation of the Minister of Home Affairs, no longer in the Regulation of the Minister of Finance.

Keywords: Regional Government, Regional Property, Regional Autonomy